

# Aceh dan Perlawanan Tiada Henti

■ Oleh: TB. Ronny Rahman Nitibaskara

“Perang Aceh, yakni perang antara masyarakat Aceh dan imperialis Belanda, meletus pertama kali tahun 1871. Pasukan musuh yang terdiri dari 3000 personil tentara terlatih berhasil dibuat bercerai-berai. Panglimanya, Mayor Jendral J.H.R Kohler, tewas tertembus peluru pada tanggal 14 April 1871.”

PADA tahun 1921, dr. R.A Kern, penasihat untuk urusan Bumi-putera dan keturunan Arab pemerintah kolonial Belanda, dalam laporannya menyatakan, “Aceh memang ditaklukan, tetapi belum sepenuhnya bisa diamankan, semangatnya masih terus berkobar-kobar untuk melawan”.

Bagi Hindia Belanda, Perang Aceh memang belum berakhir pada tahun 1914. bahkan, sesudah periode itu, perlawanan sudah berlangsung, meskipun secara sporadis, hingga tahun 1942. Dengan demikian, sepanjang sejarah kolonialisme Belanda, Aceh merupakan daerah satu-satunya di Tanah Air yang tidak pernah takluk seutuhnya kepada penjajah. Padahal, wilayah ini tak henti-hentinya digempur.

Perang Aceh, yakni perang antara masyarakat Aceh dan imperialis Belanda, meletus pertama kali tahun 1871. Pasukan musuh yang terdiri dari 3000 personil tentara terlatih berhasil dibuat bercerai-berai. Panglimanya, Mayor Jendral J.H.R Kohler, tewas tertembus peluru pada tanggal 14 April 1871. Dua tahun kemudian, maklumat perang kembali diumumkan pihak Belanda dengan Alibi; bahwa Aceh telah bersalah melanggar perjanjian perdamaian dan persahabatan antara Kesultanan Aceh dan Pemerintahan Hindia Belanda yang ditandatangani pada 30 Maret 1857. Tetapi terbukti kemudian, bahwa tuduhan itu hanya rekayasa untuk membenarkan agresi penjajah ke Tanah Rencong.

Dalam Perang Aceh II, tahun

1874-1880, pihak kesultanan berhasil membangun hubungan internasional yang baik untuk menanggulangi provokasi agresor. Usaha ini bisa berjalan mulus berkat dedikasi dan profesionalitas Perdana Menteri Habib Abdurahman Zahir. Peranan tokoh ini oleh penulis buku “De Atjeh Oorlog” (1979), Van’t Veer, digambarkan sebagai berikut:

Aceh bukan Jawa, tetapi juga bukan Siak. Aceh bisa bertahan dan cukup makmur tanpa Belanda turutan. Aceh memiliki hubungan ekonomi dan politik internasional, dan pada tahun 1873 paling tidak terdapat seorang pemimpin dengan kecerdasan pengetahuan dunia yang unggul, yaitu Perdana Menteri Habib Abdurahman Zahir.

Dalam perang kedua ini, unsur-unsur keagamaan terus-menerus dipompakan untuk dipegang sebagai landasan, sehingga mengubah perang yang tengah berkecamuk menjadi perang suci (*holy war*) di mata bala tentara Aceh. Dengan para dukungan para ulama, terutama Teuku di Tiro, yang berasal dari Pidie, perjuangan ini semakin sah wujudnya sebagai perlawanan suci melawan orang kafir. Dikatakan oleh Van’Veer;

Teungku di Tiro dan para Ulama yang lain memberikan gambaran rinci tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada seorang yang syahid.

Perang Aceh III berlangsung antara tahun 1884-1896. sedangkan Aceh IV, menurut periodisasi Van t’ Veer adalah terjadi pada tahun 1898-1942. Dalam salah satu episodanya

yang terjadi peristiwa sangat dramatis. Pada tanggal 14 Juni 1914 kampung pertama di Tanah Alas, Kuto Reh, disebut pasukan agresor. Dalam tempo hanya setengah jam, seluruh penduduk ditumpas habis. Mereka terdiri dari 313 laki-laki, 189 wanita, 59 anak-anak. Dalam catatan mengenai peristiwa itu disebutkan; sebelum serangan dimulai, terdengar bagaimana di dalam orang berdoa dan berdzikir. Kemudian mulailah pembantaian.

**Agama sebagai sumber inspirasi**

Terlihat dengan jelas, bahwa dalam sejarahnya, rakyat Aceh senantiasa menempatkan agama Islam sebagai motor penggerak didalam perlawanannya terhadap setiap hegemoni.

Setelah mendapat pembenaran yang diambil dari doktrin agama itulah mereka memperoleh semangat dan daya juang.

Dalam rangka memahami aspirasi keagamaan tersebut, sejak tahun baru hijriah 1424, yang bertepatan dengan 4 Maret 2003, di provinsi paling barat itu telah berdiri mahkamah syariah (MS). Pembentukan lembaga baru ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No.44 Tahun 1999 tentang keistimewaan aceh dan dan UU No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh.

Dalam UU No.44/1999 disebutkan empat keistimewaan Aceh. Pertama, penerapan syarat Islam dalam seluruh aspek kehidupan beragama. Kedua, penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syarat Islam dengan tanpa mengabaikan kurikulum umum. Ketiga, dimasukan unsur adat dalam struktur pemerintahan desa. Keempat, pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Untuk me-

nindaklanjuti keistimewaan ini, Pemrov Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sudah menerbitkan empat Peraturan Daerah (Perda), masing-masing Perda No.3 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Perda No.5/2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Perda No.6/2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Perda No.7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Dengan diadopsinya seluruh Syariat Islam menjadi hukum positif,



Pengalaman yang panjang menghadapi konflik dimasa lalu, dilihat dari sudut transmisi kebudayaan, dapat memberikan sumbangan berarti terhadap cara pandang sebagian rakyat Aceh atas konflik bersenjata yang kini berlangsung disekitar mereka. Tampak Prajurit dari Brimob yang siap diluncurkan untuk memulihkan keamanan di Aceh.

semestinya tidak ada lagi alasan bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mendasarkan pemberontakannya pada alibi-alibi agama. Lagi pula, dalam sejarah perlawanan sebagian rakyat Aceh terhadap Pemerintah Pusat, motif agama nyaris tidak pernah mengemuka.

Pemberontakan Aceh terhadap Pemerintah Pusat yang pecah pada tanggal 21 September 1953 semata-mata karena kausa politik. Pada tanggal 17 Desember 1949 Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) mengeluarkan keputusan pembentukan Provinsi Aceh dan sekaligus mengangkat Daut Beureueh sebagai Gubernurnya. Tetapi, kebijakan ini pada tahun 1950 dicabut. Aceh dilebur kedalam Provinsi

Sumatera Utara, dan ulama yang di segani di Serambi Mekkah itu ditarik ke pusat untuk menjadi pegawai tinggi di Departemen Dalam Negeri. Keputusan itu kontan menimbulkan perlawanan, yang berujung kepada pemberontakan. Dalam pergolakan ini, Daud Beureueh oleh rakyat setempat diangkat sebagai wali negara Aceh yang memegang langsung tali komando perlawanan.

Akibat kerasnya permusuhan tersebut, Pemerintah Pusat pada 23 Mei 1959 mengubah kembali status Aceh sebagai Provinsi. Setelah itu,

hubungan dengan Pusat berangsur membaik, sampai dengan 4 Desember 1976 tatkala Teungku Hasan Muhammad Tenjoeng Bungong atau yang lebih akrab dengan panggilan Hasan Tiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Semenjak munculnya GAM, Aceh oleh segelintir dipaksa memasuki konflik yang berkepanjangan dengan Pusat hingga sekarang.

Konflik yang telah berlangsung lama, apalagi bersenjata, umumnya mengalami berbagai transformasi, terutama dari segi kausanya. Motif yang semula politik, bisa bergeser menjadi kausa agama, tenisitas dan kedaerahan (*ethno-religion localism*). Dalam kasus Aceh, ketiga kausa transformatif itu telah bercampur baur, mana yang lebih menonjol sulit diketahui. Bahkan, konflik yang sebelumnya terjadi, telah menjadi kausa bagi perlawanan bersenjata berikutnya. Contoh, munculnya pasukan *Inong Balee*, yakni pasukan wanita yang bergabung bersama GAM. Anggota pasukan ini terdiri dari para wanita yang kehilangan suami, ayah, adik, kakak atau saudara yang tewas di tangan TNI.

Kesatuan tempur perempuan itu sebenarnya tidak muncul tiba-tiba. Ia memiliki sejarah yang panjang, bisa dirunut sampai abad 17 ketika Aceh bertempur melawan portugis. Para janda dan wanita yang kehilangan sanak saudara dalam peperangan, turut maju kemedan laga, guna menuntut balas. Jadi, pasukan *Inong Balee* itu lahir sebagai konsekuensi logis dari adanya konflik bersenjata yang sudah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, sebab-sebab dari kemunculannya bersifat transformatif, yakni konflik senjata yang terlebih dahulu meletus, bukan kausa asal yang menjadi pemicu perlawanan secara keseluruhan.

Sehubungan dengan transformasi konflik tersebut, langkah yang kini ditempuh Pemerintah sudah berada di jalur yang benar untuk menghindari agama dijadikan landasan pemberontakan. Namun, dengan adanya keistimewaan Aceh itu, muncul kerawanan lain, yaitu kemungkinan tidak tunduknya NAD dimasa depan terhadap sumber-sumber hukum positif RI, karena semua peraturan akan diperhadapkan dengan syariat Islam. Suatu contoh, sulit diterima bagi kalangan ahli hukum Islam bila Al-Qur'an dan Sunnah keberlakuannya tergantung oleh peraturan lain, semisal Perda. Untuk memecahkan persoalan itu, kini dibuat Qanun yang merupakan hasil ijtihad para ulama untuk keberlakuan kedua Sumber Hukum tersebut. Disinilah kemudian tampak, bahwa ada dualisme keberlakuan hukum yang terus-menerus bersitegang. Pancasila dan UUD 1945 akan tak henti-hentinya diperhadapkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW.

Konflik hukum itu, apabila tidak segera diatasi, akan memberi ruang bagi GAM untuk memanfaatkannya. Kondisi tersebut akan dijadikan isu agama untuk menarik hati rakyat dan sebagai alat menjustifikasi sepak terjangnya. Dengan itu, Pancasila dan UUD 1945 (sebagai simbol negara sekuler) adalah tindakan

“Pasukan Inong Balee lahir sebagai konsekuensi logis dari adanya konflik bersenjata yang sudah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, sebab-sebab dari kemunculannya bersifat transformatif, yakni konflik senjata yang terlebih dahulu meletus, bukan kausa asal yang menjadi pemicu perlawanan secara keseluruhan”.

suci, karena hal itu sebagai prasyarat tegaknya syariat Islam di Tanah Rencong. Kampanye semacam ini, sangat mudah dilakukan, tetapi efeknya luar biasa. Sekali perlawanan bersenjata kembali memperoleh pembenaran secara agama, ia sulit ditumpas.

Dalam buku saya yang berjudul “Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah” (Peradaban, 2002) kami paparkan proposisi-proposisi yang bertalian dengan konflik yang telah mendapat bumbu agama. Berdasarkan kerangka itu, perlawanan, termasuk pemberontakan, yang didasarkan pada pembenaran agama juga memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

*Pertama*, berlangsung sengit dan bertahan lama, selama masalah ideologi/agama yang melandasi pemberontakan tersebut tak mampu dijembatani atau dipecahkan sebagaimana mestinya.

*Kedua*, para pihak yang melakukan pemberontakan memposisikan dirinya tengah membela kebenaran yang dijunjung tinggi dan bersifat absolute.

*Ketiga*, korban yang jatuh ditempatkan sebagai martir/pahlawan, sehingga banyaknya korban dari kawan seiring tidak membuat jera ang-

gota kelompok yang lain. Bahkan, nyawa yang bertubi-tubi melayang itu dapat memicu semangat perlawanan. Mati yang telah mendapatkan pembenaran keyakinan/ideologis tersebut kerap kali malah dicari.

*Empat*, meningkatkan militansi. Konflik yang berlangsung lama, di samping memberikan kontribusi terhadap pengalaman bertempur dan menyuburkan dendam kesumat yang terus ditransmisikan, juga meningkatkan militansi, terutama setelah justifikasi agama terhadap perlawanan yang dilancarkan semakin mapan.

### Pengalaman Menghadapi Konflik dan Kebanggaan Sejarah

Pengalaman yang panjang menghadapi konflik dimasa lalu, dilihat dari sudut transmisi kebudayaan, dapat memberikan sumbangan berarti terhadap cara pandang sebagian rakyat Aceh atas konflik bersenjata yang kini berlangsung disekitar mereka. Konflik-konflik tersebut, sedikit banyak memberikan andil pada pemupukan integrasi etnisitas, ideologi/agama, dan lokalitas pada sebagian anggota masyarakat di wilayah itu. Integrasi tersebut semakin kuat bila ditopang dengan kesadaran sejarah atas kejayaan masa silam.

Pengalaman konflik dan kebanggaan atas masa lalu itu, adalah satu contohnya, dapat dilihat dalam laporan *Tempo* (22/6/2003). Menurut majalah tersebut, hingga kini penduduk Kabupaten Bireun, 218 kilometer dari Banda Aceh, masih fasih bercerita tentang 42 laki-laki dan 2 wanita yang tewas bertempur melawan Belanda di Jeunieb pada tahun 1887. Makam mereka di Bireun masih bersih dengan monumen kecil di gerbangnya.

Barangkali kebanggaan sejarah, antara lain Aceh yang pernah sebagai negara, maka GAM dalam pemberontakannya tidak mendefinisikan dirinya sebagai gerakan, melainkan sebagai “negara”. Hal ini setidaknya tercermin pada struktur



Penumpasan GAM memerlukan waktu lama, terlebih-lebih gerakan separatis itu telah mengembangkan strategi perang gerilya. TNI & Polri dituntut waspada selama dua puluh empat jam penuh.

jabatan kenegaraan dalam penyebutan posisi para tokohnya. Kita tahu, bahwa organisasi tersebut dipucuki oleh Hasan Tiro yang bertindak sebagai Wali Nangroe atau Presiden GAM, kemudian ada Teungku Malik Mahmud sebagai Perdana Menteri, Menlu Zaini Abdullah, Menhan Zakaria Zaman Bin Kaman dan sebagainya.

Para personil yang mencitrakan GAM sebagai negara tersebut kini berada di luar negeri. Walaupun sebagai pelarian politik, dan tinggal jauh dirantau, peranan mereka sangat besar dalam menentukan strategi perlawanan. Kemampuan lainnya yang berbahaya bagi mereka adalah manuver-manuvernya dalam rangka penggalan dukungan luar negeri.

Akibat kiprah mereka di dunia internasional, penumpasan GAM bertambah satu front, yakni front diplomatik. Dengan demikian, secara keseluruhan, 'wilayah' peperangan melawan GAM itu meliputi, front pertempuran, diplomatik, dukungan penduduk dan alur logistik. Semua front ini, menuntut adanya taktik dan strategi serta sarana tempur yang berbeda-beda untuk memenangkannya.

### Perang yang Memakan Waktu

Banyaknya front tersebut, hampir dapat dipastikan akan menyebabkan penumpasan GAM akan memerlukan waktu lama, terlebih-lebih gerakan separatis itu telah mengembangkan strategi perang

gerilya. Perang ini menurut Letnan Agus Widjoyo, anggota DPR dari Fraksi TNI/Polri (*Tempo*, 29/6/2003) adalah sebagai perang yang capek. TNI tidak bisa mengerahkan kemampuannya secara optimum, karena GAM mengandalkan satuan-satuan kecil setingkat pleton yang beranggotakan kurang dari 30 orang, yang bisa menyusup kemana-mana, bahkan gampang menyatu ketika berbaur bersama penduduk.

Satu faktor itu saja, yakni memilah penduduk dari GAM, bukan pekerjaan mudah. Sudah seringkali terjadi insiden salah tangkap, atau salah tembak yang sudah menjadi isu sentral pelanggaran HAM, seperti yang terjadi pada 21 Mei 2003 di Desa Cot Rabo Tonang, Pedalaman Aceh Utara. Diberitakan bahwa TNI menembak tujuh warga yang diduga anggota GAM. Tentang status warga yang tewas itu, kemudian menjadi simpang siur. Beberapa media, terutama media asing, menyebutkan bahwa orang-orang meninggal diujung laras senapan itu adalah warga sipil.

Dalam menghadapi perang gerilya ini, TNI dituntut waspada selama dua puluh empat jam penuh. Berita tentang meledaknya granat pada keramaian umum di berbagai wilayah Aceh sudah tidak terhitung, demikian pula dengan penembakan-penembakan yang tidak pilih-pilih sasaran. Kesemuanya itu merupakan bagian dari taktik perang gerilya

yang serba hit and run. Karena sangat percaya dengan kemampuan taktik ini, maka juru bicara GAM, Teungku Sofyan Daud dengan lantang berani mengatakan, "Kamilah yang menentukan kapan dan dimana perang akan berlangsung" (*Tempo*, 22/6/2003). Apa yang disampaikan itu mirip dengan doktrin perang gerilya yang dicetuskan oleh Jendral Vo Nguyen Giap dari Vietnam Utara dahulu. Dalam bukunya yang berjudul, "People's War People's army" (Hanoi; foreign Languages Publising, 1961) dinyatakan :

Tidak ada batasan yang jelas tentang front dalam peperangan ini. Batasnya adalah di mana musuh berada. Front berada dimana-mana, disetiap tempat (*There was no clearly-defined front in this war. It was the where the enemy was. The front was nowhere, it was everywhere*). (Hal.21).

Pada bagian lain, Giap juga menjelaskan beberapa prinsip dasar strategi perang gerilya yang pernah di gelar dinegaranya, yang tampaknya juga diterapkan oleh GAM. Ia katakan: Perlu menghimpun ribuan kemenangan-kemenangan kecil untuk diubah menjadi suatu keberhasilan besar. Secara bertahap hal itu mengubah keseimbangan kekuatan yang mempercepat mentransformasikan kelemahan kami menjadi keunggulan (*it was necessary to accumulate thousand of small victories to turn them into a greet success, thus gradually altering the balance of forces, in transforming our weakness into power*) (Hal.28)

Kami tidak hanya berperang dilahan militer, tetapi juga berperang dibidang politik, ekonomi dan budaya (*Not only did we fight in the military field but also in the political, economic and cultural fields*) (Hal.97).

Dengan gambaran perang semacam itu, maka bisa dimengerti bila Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto menyatakan, terlalu dini untuk mengatakan darurat militer di Aceh selesai setelah enam bulan (*Kompas*, 7/7/2003). Pada bagian lain ia juga mengatakan, bahwa belum pernah ada negara di dunia ini yang

melakukan operasi melawan gerilyawan hanya enam bulan, Operasi militer bisa setahun, dua tahun, atau bahkan sepuluh tahun.

Apabila kita cermati dengan seksama, terdapat butir-butir penting yang membuat GAM agak sulit ditaklukan dengan cepat, yakni kemampuan gerakan separatis itu dalam melakukan :

*Pertama*, propaganda mengenai ikatan primordial yang berupa ethno-religion-localism dan kebanggaan sejarah yang direkayasa sebagai sumber-sumber nasionalisme aceh. Kampanye ini untuk memperoleh dukungan rakyat dan internasional.

*Kedua*, Diplomasi dengan berbagai pihak di luar negeri. *Ketiga*, strategi dan taktik perang yang jitu.

*Keempat*, pengembangan sumber-sumber dapat dipergunakan untuk pemenuhan logistik. *Kelima*, Manuver politik melalui penyekatan informasi, seperti isu-isu pelanggaran HAM. Dengan adanya kemampuan ini, kebijakan darurat militer yang telah ditetapkan Jakarta berdasarkan Keppres No.28/2003 menjadi goyah, karena semakin banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak di dalam ataupun di luar negeri. Untuk menumpas GAM, kita harus berperang melumpuhkan lima kemampuan tersebut secara serentak, tidak boleh secara parsial, karena kesemuanya bersifat tali temali. Satu bidang dikalahkan, masih akan mungkin diperkuat kembali oleh bidang lain yang masih jaya. Misalnya, dalam berbagai pertempuran (*battle*) menang, tetapi dalam bidang diplomatik kita kalah, maka hal itu bisa menyeret kita ke jurang kekalahan perang (*war*). Oleh sebab itu, lima hal tersebut juga merupakan indikator, bahwa perang yang kini digelar medannya sangat luas, sehingga kurang bijaksana apabila hanya dibebankan dipundak aparat keamanan. Aceh adalah persoalan kita sebagai bangsa. Jadi, bukan semata-mata masalah keamanan, walaupun itu yang kini terpenting untuk segera dipulihkan. \*\*\*

## Penandatanganan MOU Indonesia dan Amerika

PENYAMPAIAN ucapan penghargaan dan terima kasih atas kerja sama dan bantuan yang telah Polri terima dari Pemerintah Amerika Serikat disampaikan Kapolri pada acara penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat yang diwakili oleh wakil Duta Besar Amerika Serikat, Mr. Lewis Amselem pada tanggal 25 September 2003 di Jakarta.

Kerja sama yang telah terjalin dan bantuan yang diberikan kepada Polri telah dimulai sejak Pemerintah Indonesia menetapkan komitmennya terhadap demokrasi sebagai cara untuk mengembangkan negara Indonesia. Pengembangan Polri harus diarahkan terhadap kinerja Polri yang mampu menghadapi tuntutan perubahan dari publiknya. Sementara ini, Pemerintah Indonesia memiliki keterbatasan dalam menyediakan peralatan Kepolisian dan anggaran yang dibutuhkan Polri.

Dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat secara profesional, Polri harus terus melakukan pengembangan secara bertahap, salah satunya adalah pengembangan SDM baik dalam kualitas maupun kuantitas. Dan jumlah anggaran yang tersedia telah dialokasikan untuk hal yang diprioritaskan dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Melalui bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Amerika, saat ini Polri sedang membangun sebuah anti terror yang memadai berada di bawah kendali Bareskrim Polri. Unit ini terdiri dari tiga team yaitu **Team Intelijen dan Analisis, Team Penanganan Krisis, dan Team Pe-**

**nyelidik** di samping Team Pendukung. Dan Polri berharap dapat memiliki Team Anti Teror yang kuat dalam waktu dekat yang mampu memelihara dan memenuhi tuntutan tugas.

Bantuan dan hibah sebesar 10 juta dolar Amerika akan diarahkan untuk beberapa proyek, antara lain **program reformasi Polri menjadi Polisi Sipil, pemolisian masyarakat dan pelatihannya, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri selaku penyidik.**

Polri membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Amerika Serikat untuk membangun kemampuan teknologi dalam menginvestigasi kejahatan komputer, kejahatan yang terjadi di laut. Sedangkan bantuan lainnya seperti dalam menghadapi kasus pembakaran dan kemampuan forensik merupakan cara untuk mencapai kemampuan Polisi dalam menginvestigasi berbagai kejahatan di beberapa tempat.

Polri sangat menghargai bantuan dan hibah yang diberikan Pemerintah Amerika Serikat kepada Pemerintah Indonesia, khususnya kepada Polri, hal ini terlihat bahwa Pemerintah Amerika Serikat sangat memahami tentang apa yang harus dilakukan dalam suatu negara demokrasi yang baru seperti Indonesia agar Polri menjadi mampu dalam menghadapi berbagai tuntutan dari masyarakat untuk lebih ditingkatkan mulai saat ini dan di masa mendatang. (*Disarikan dari Amanat-amanat Kapolri pada Penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat*). ■ T U T